

TESIS

**PENGARUH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 TERHADAP PERUBAHAN KONFIGURASI
KEKUASAAN KEHAKIMAN**



EMILIANUS AFANDI

No. Mhs : 115201601

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : EMILIANUS AFANDI
Nomor Mahasiswa : 115201601
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

23/11 13
.....


.....

Y. Hartono, S.H., M.Hum

7/11 '13
.....


.....



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : EMILIANUS AFANDI
Nomor Mahasiswa : 115201601
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman

Nama Penguji

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum
(Ketua)

16/1/14
.....

Y. Hartono, S.H., M.Hum
(Anggota)

15/1/14
.....

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum
(Anggota)

15/1/14
.....

Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emilianus Afandi

No. Mhs : 115201601

Alamat : Jonggrangan, RT. 02/RW. 01, Klaten Utara, Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik (magister hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta,.....2013

Penulis

Emilianus Afandi

No. Mhs: 115201601

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tipe penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Metode pendekatan yaitu pendekatan teoretis dan pendekatan politik hukum, dengan mengkaji teori negara hukum dan pembagian kekuasaan dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Temuan studi membuktikan bahwa: (1) amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan bagi konfigurasi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, dilakukan oleh Mahkamah Agung yang membawahi badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Amandemen UUD 1945 dalam kaitannya dengan perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman dirancang untuk menjamin independensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi agar lebih kuat, berwibawa, tidak memihak, bertanggungjawab dan mampu menyelesaikan semua persengketaan hukum dan politik secara objektif. (2) Pola pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dan mekanisme pengawasan *checks and balances* tidak berimbang, masih didominasi oleh Presiden dan DPR. Dominasi kuasa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kekuasaan dibidang legislatif dan kekuasaan dibidang yudikatif yaitu memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Dominasi kuasa Presiden bersama dengan DPR dalam hal menyeleksi, mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung dan mengangkat dan menetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi. (3) Perlunya amandemen ulang UUD 1945 terutama menyangkut pola pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dan pengawasan *checks and balances* antara Presiden bersama DPR terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mengubah dan membatasi kuasa Presiden bersama DPR di bidang yudikatif baik itu menyangkut grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi maupun mekanisme rekrutmen calon hakim agung dan calon hakim konstitusi.

Kata Kunci: Amandemen UUD 1945, Independensi dan Imparsialitas Kekuasaan Kehakiman, Pembagian Kekuasaan, check and balances.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the judicial power configuration changes after the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. This type of research is the study of literature to related of judicial power. Method of approach is a theoretical approach and the legal politics approach, by examining the theory of law and the sharing of powers in relation to the judicial power. The study findings proves that: (1) amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has brought changes to the configuration of judicial power as an independent power, carried out by the Supreme Court which supervises the judicial bodies that are below and by a Constitutional Court. Amendments to the Constitution 1945 in relation to the changes configuration of judicial power are designed to ensure the independence of the Supreme Court and the Constitutional Court to be more powerful, authoritative, impartial, responsible and able to resolve all legal and political disputes objectively. (2) Pattern of sharing of power and control mechanisms of checks and balances are not balanced, still dominated by the President and Parliament. Dominance of the President's powers as head of state and head of government, the power sector in the field of legislative and judicial powers that grant clemency, rehabilitation, amnesty and abolition. The President power domination along with the Parliament in terms of selecting, appoint and dismiss the Chief Justice and appoint and set the Judge of Constitutional Court. (3) The need for repeated amendments to the Constitution 1945, especially the patterns of sharing of power and control mechanisms of checks and balances between the President and the Parliament on the implementation of judicial power is held by the Supreme Court and the Constitutional Court. Change and limit the power of the President and the Parliament in both the field of judiciary regarding clemency, rehabilitation, amnesty and abolition as well as the mechanism of recruitment of candidates of supreme judges and candidates of constitutional judges.

Keywords: Amendment of the Constitution 1945, Independence and Impartiality Judicial Power, Sharing of Power, and Checks and Balances.

KATA PENGANTAR

Studi ini merupakan sebuah kajian ilmiah dengan mengambil topik: **Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman.** Berkaitan dengan topik tesis ini, penulis mempunyai ketertarikan tersendiri untuk melakukan penelitian khusus terhadap kekuasaan kehakiman, dikarenakan lembaga ini sangat rentan dan cenderung menjadi target intervensi oleh kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuatan sosial lainnya. Konsekuensinya, kekuasaan kehakiman tidak mampu menerapkan prinsip independensi dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan kekuasaannya secara efektif dan benar. Agenda reformasi kekuasaan kehakiman melalui amandemen UUD 1945 menjadi pintu masuk dari kajian ini untuk melihat lebih lengkap dan menyeluruh tentang apa dan bagaimana serta sejauh mana upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan lancar berkat adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Isteri tercinta atas segala pengorbanan, pengertian, kesabaran dan dorongannya pada saat mendampingi dan menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Keluarga besar, ayahanda, ibunda (almarhuma), kakak dan adik-adikku semuanya karena besarnya harapan mereka telah memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

3. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing utama dengan segala keikhlasannya, telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan pencerahan kepada penulis dalam proses penulisan tesis ini.
4. Y. Hartono, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing anggota, telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku dosen penguji anggota, telah memberikan masukan dan arahan dalam perbaikan penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta yang telah membentuk wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya.
7. Semua pihak yang tidak sempat disebut satu demi satu, atas segala doa dan dukungannya penulis mengucapkan terima kasih.

Semoga hasil studi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum. Penulis sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran, masukan dan kritik dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi perbaikan tesis ini ke depannya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2013

Emilianus Afandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	14
2. Batasan Masalah.....	14
3. Keaslian Penelitian.....	16
4. Manfaat Penelitian.....	22
B. Tujuan Penelitian.....	23
D. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Negara Hukum.....	26
B. Pembagian Kekuasaan.....	44
C. Kekuasaan Kehakiman.....	49
D. Hubungan Kekuasaan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.....	79
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN.....	86
1. Jenis Penelitian.....	86

	2. Pendekatan.....	86
	3. Sumber dan Bahan Penelitian.....	87
	4. Lokasi Penelitian.....	89
	5. Metode Pengumpulan Data.....	89
	6. Metode Analisis Data.....	91
BAB IV	PENGARUH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP PERUBAHAN KONFIGURASI KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	94
	A. Bagaimana Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman.....	94
	B. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala sehubungan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman.....	158
	C. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala sehubungan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman.....	198
BAB V	PENUTUP.....	235
	A. Kesimpulan.....	235
	B. Saran.....	243
	DAFTAR PUSTAKA.....	244